



POHON KINERJA



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

**MATRIK TINDAK LANJUT AKIP INTERNAL
BADAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perlu perbaikan pohon kinerja sehingga penyusunan berdasarkan CSF (Critical Succes Factor) tidak berdasarkan program/kegiatan/struktur organisasi.	Telah menyusun dan memperbaiki pohon kinerja dengan mencantumkan CSF (Critical Succes Factor).	Terlampir
2.	Agar mencantumkan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideology, politik, radikal dan sumber daya ekonomi) sebagaimana tertuang dalam RENSTRA.	Telah mencantumkan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama ((Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideology, politik, radikal dan sumber daya ekonomi) pada BAB II halaman 12 dokumen LKJIP.	Terlampir
3.	Agar memperbaiki Laporan Kinerja Tahun 2025 untuk mencantumkan rumus/perhitungan efisiensi pada analisis anggaran Tahun 2024.	Telah mencantumkan rumus/perhitungan efisiensi pada analisis anggaran Tahun 2024, pada BAB III halaman 46 dokumen LKJIP.	Terlampir
4.	Untuk melampirkan bukti mengikuti Bimtek/Workshop SAKIP berupa sertifikat/Surat Tugas.	Telah melampirkan Sertifikat Bimtek SAKIP.	Terlampir

Kebumen, 19 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN



WIDIA PMOKO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681128 199603 1 006



POHON KINERJA



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

GAMBARAN UMUM

1. Informasi/Data tentang Nilai-nilai Luhur Kebangsaan.

Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen adalah mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan dengan indikator Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, radikal dan Sumber Daya Ekonomi dengan target awal Tahun 2021 sebesar 57,14% dengan perkiraan capaian kondisi yang diharapkan pada akhir tahun perencanaan (Tahun 2026) sebesar 78,57%.

Pada Tahun 2024 Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi telah tercapai sebesar 100%.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, antara lain :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan serta Nasionalisme;
 - b. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama;
 - c. Masih banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - d. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
2. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

- a. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
- b. Adanya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah belah persatuan nasional
- c. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
- d. Meningkatnya serangan siber (*cybercrime*) seperti peretasan, pencurian data, dan disinformasi yang mengancam keamanan nasional.

3. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1. Meningkatkan kapasitas pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan orang asing.

Melalui upaya meningkatkan kapasitas pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan orang asing, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keamanan.

3.1.2. Meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Tujuan meningkatkan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik serta pengembangan etika dan budaya politik adalah untuk membangun fondasi yang kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memberikan pendidikan politik yang menyeluruh, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik secara efektif dan bertanggung jawab.

3.1.3. Terwujudnya kewaspadaan dini daerah

Tujuan terwujudnya kewaspadaan dini di suatu daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan merespons secara cepat terhadap potensi ancaman atau risiko yang mungkin terjadi. Dengan kewaspadaan dini yang efektif, daerah dapat mengurangi dampak negatif dari adanya konflik sosial, atau ancaman keamanan lainnya.

3.1.4. Meningkatkan Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Tujuan meningkatkan elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah untuk memperkuat fondasi nilai-nilai yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mewakili nilai-nilai universal seperti ketuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penguatan ideologi Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya dijunjung tinggi secara formal, tetapi juga menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Selain itu, penguatan karakter kebangsaan bertujuan untuk membangun kesadaran akan identitas dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Ini melibatkan pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa tanggung jawab, solidaritas, dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Penguatan karakter kebangsaan juga mencakup pengenalan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia.

3.1.5. Meningkatkan Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan meningkatkan elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan adalah untuk memperkuat kesadaran akan identitas dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa, serta pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman.

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	CSF (Intermediate Outcome) Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)
Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Meningkatnya kapasitas pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan pengawasan terhadap	Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Ultimate Outcome (sasaran OPD)	Outcome (Sasaran Program)	CSF (Intermediete Outcome) Sasaran Kegiatan (apabila beberapa kegiatan dirumuskan jadi satu)
	Organisasi Kemasyarakatan dan orang asing.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
		Terlaksananya kegiatan deteksi dini dan cegah dini (Crosscutting dengan KODIM, POLRES, KEJAKSAAN).
	Meningkatnya Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Meningkatnya Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
Terlaksananya kegiatan deteksi dini dan cegah dini (Crosscutting dengan KODIM, POLRES, KEJAKSAAN).	Terlaksananya rapat koordinasi PUSKOMIN (Pusat Komunikasi dan Informasi).
Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa
Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Adapun Pohon Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram berikut:

POHON KINERJA



3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Terwujudnya kewaspadaan dini daerah				Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi
	Meningkatnya kapasitas pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan orang asing.			Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan ormas Asing di Daerah

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.			Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum
		Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan um/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, emilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah			Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi.
		Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik		Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota
			Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
			Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			Konflik di Daerah	
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			Penanganan Konflik di Daerah.	Penanganan Konflik di Daerah
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Meningkatnya Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
		Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Karakter Kebangsaan
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
	Meningkatnya Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan			Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
		Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Ultimate Outcome	Outcome	Intermediete Outcome (CSF)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Kebumen, 13 Agustus 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199603 1 006

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi

Berdasarkan Tabel 2.1. diatas, **formulasi pengukuran Indikator Kinerja Utama** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

(Jumlah potensi konflik yang dicegah/Jumlah potensi konflik yang ada) x 100%
sedangkan tipe pengukurannya : Non Kumulatif

Berdasarkan Tabel di atas, alokasi anggaran Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebesar Rp 46.275.493.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 44.761.423.774,00. atau 96,73%. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil serta melakukan efisiensi anggaran. Mendasari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun fomulasi pengukurannya sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi) - RAKi}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Efisiensi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen antara lain pada kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Efisiensi pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah karena adanya 1 orang karyawan PNS (subkoordinator) yang pensiun dan 1 orang karyawan PNS (subkoordinator) meninggal dunia belum terisi sampai dengan akhir tahun anggaran.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Efisiensi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah karena adanya penghematan belanja pada rekening listrik.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

SERTIFIKAT

Nomor : 000.8 / 0305 / 2025

Diberikan kepada :

Nama : Tri Tunggal Eko Sapto, S.KM., M.PH
NIP : 197201051994031006
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tanggal 25 dan 26 Februari 2025 bertempat di Co Working Space Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen meliputi 12 (dua belas) jam pelajaran.

Kebumen, 27 Februari 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

SERTIFIKAT
Nomor : 000.8 / 0306 / 2025

Diberikan kepada :

Nama : Sumarwoto, S.ST.
NIP : 197601291996031001
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai peserta dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tanggal 25 dan 26 Februari 2025 bertempat di Co Working Space Lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen meliputi 12 (dua belas) jam pelajaran.

Kebumen, 27 Februari 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto